

MELAMPAUI POPULISME ISLAM

M. Minanur Rohman

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: m.minanur.rohman@uingusdur.ac.id

Abstract: *The Islamic populist movement is gaining more attraction in Indonesia. In this article, the researchers focus on the question of how to transcend the sentiment of Islamic populism in our public debates. Instead of marginalizing Islamic populist voices, this article offers Chantal Mouffe's theory of progressive populism and assumes that progressive populism can ultimately surpass Islamic populism. This research introduces three key concepts of Chantal Mouffe's thinking as a model for transcending Islamic populism in Indonesia. The three concepts are (1) the distinction between the political and politics, (2) agonistic democracy, and (3) progressive populism*

Keywords: *Islamic Populism, Progressive Populism, Chantal Mouffe*

Abstrak: Gerakan populisme Islam mendapatkan momentum di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis berfokus pada pertanyaan bagaimana melampaui sentimen populisme Islam ini dalam ruang publik. Alih-alih mengucilkan suara populis Islam, artikel ini menawarkan teori populisme progresif Chantal Mouffe dan mengandaikan bahwa populisme progresif Chantal Mouffe pada akhirnya kompatibel untuk melampaui populisme Islam. Penelitian ini memperkenalkan tiga konsep kunci dari pemikiran Mouffe yang dapat menjadi model untuk melampaui populisme Islam di Indonesia, antara lain distingsi antara politik dan yang politis, demokrasi agonistik, dan populisme progresif.

Kata Kunci: Populisme Islam, Populisme Progresif, Chantal Mouffe

PENDAHULUAN

Penggunaan Islam sebagai identitas dalam gerakan populis sedang marak terjadi di negara-negara berpenduduk Muslim, tidak terkecuali Indonesia. Populisme Islam memiliki karakteristik yang sama dengan populisme pada umumnya. Populisme Islam, dalam tilikan Vedi R. Hadiz, menekankan kata *ummat* sebagai ganti kata *rakyat* (*the people*) yang acapkali dimanfaatkan dalam bahasa populisme.¹

Masalah-masalah demokrasi yang ditimbulkan oleh meningkatnya daya tarik populisme sayap kanan yang eksklusif ini, sejak saat itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi sasaran banyak perhatian ilmiah. Namun, baik dalam wacana sosial maupun akademik, perhatian ini sering kali berbentuk kecaman yang sangat

¹ Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*, (Jakarta: LP3S dan Universitas Indonesia, 2019), h. 4.

moralistik terhadap logika populis sayap kanan, dengan ini secara apriori mengecualikan suara konstitutifnya dari debat publik.² Namun, sikap mengutuk ini hanya menghidupkan kembali, bukan meredakan, ketakutan nativisme dan sentimen anti-kemapanan yang muncul yang mendorong gerakan radikal-kanan.

Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mencari jalan keluar dan pelampauan atas populisme Islam. Untuk menemukan jalur-jalur ini, saya mendasarkan jawaban saya pada teori-teori Chantal Mouffe yang menegaskan populisme progresif. Dengan demikian, tujuannya pada dasarnya adalah untuk melampaui jenis populisme Islam yang disebutkan di atas dengan mensintesis dan pada akhirnya mengangkat cita-cita progresif melalui pemikiran Chantal Mouffe.

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian kualitatif yang berbasis pustaka (*library-based research*), penelitian ini akan menggunakan pendekatan populisme progresif Chantal Mouffe. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: deskriptif-analitik yang bertumpu pada titik tolak *Qualitative Content Analysis*.³ Sebagai strategi populisme, teori Chantal Mouffe difungsikan untuk menemukan populisme yang ideal.

Diskursus penelitian tentang populisme Islam sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian tentang populisme Islam yang spesifik mengangkat populisme Indonesia diantaranya: *Pertama*, Populisme Islam karya Vedi Hadiz⁴, *Kedua*, Populisme Islam Tantangan atau Ancaman⁵, *Ketiga*, Populisme Dan Dinamika Otoritas Keagamaan

² , Chantal Mouffe, *The "End Of Politics" and The Challenge Of Right-Wing Populism*. Dalam F. Panizza (Ed.), *Populism and the Mirror of Democracy*, (London, England: Verso, 2005), hlm. 50–71.

³ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta, Kanisius, 1990), hlm. 63

⁴ Berfokus pada umat Islam di Indonesia, Mesir, dan Turki, Vedi R. Hadiz mencoba melihat cara paling umum dalam pembentukan populisme Islam. Buku ini menjelaskan secara lebih mendalam tentang kaitan antara demokratisasi, perubahan finansial, dan keinginan kuat globalisasi yang telah mempengaruhi perkembangan perjuangan kelompok umat Islam di tiga negara ini. Dengan menggarisbawahi sudut pandang politik moneter dan sosio-verifikasi, poin penting yang perlu disampaikan oleh Vedi adalah bahwa motivasi kepentingan dan keuangan benar-benar dapat mengantarkan kekuatan politik Islam di tengah-tengah masyarakat, bukan dengan doktrin atau ajaran agama yang sebenarnya. Vedi R Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*, (Jakarta: LP3ES, 2021).

⁵ Penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran populisme memang merupakan kekhasan yang khas dan absah bagi kerangka negara demokrasi karena ia dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah. Memandang populisme Islam di Indonesia hanya sebagai bahaya dan makar adalah berlebihan dan menunjukkan anti kritik. Putra, Andi Eka. "Populisme islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15, no. 02 (2019): 218-227.

Dalam Islam Di Media Sosial⁶, *Keempat*, Gerakan Politik Dan Populisme Islam (Studi Kasus Aksi Bela Islam 411 Dan 212 Tahun 2016)⁷, *Kelima*, Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (Gnppf-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (Nu)⁸. Melihat penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian berupaya melampaui populisme Islam di Indonesia dengan pemikiran Chantal Mouffe.

Agar pembahasan artikel ini sistematis, bagian pertama dari artikel ini akan memberikan demarkasi singkat tentang populisme. Selanjutnya, di bagian kedua, artikel ini akan menjelaskan populisme Islam yang berkembang terutama di Indonesia. Namun, saya berpendapat bahwa model populisme ini harus dilampaui. Oleh karena itu, ketiga, dengan mensintesis model Mouffian, saya mengusulkan model normatif alternatif populisme Islam progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Populisme

Istilah populisme telah digunakan sejak zaman dahulu, namun ia belum diakui secara umum sebagai sebuah konsep yang memiliki esensi yang konsisten.⁹ Populisme harus selalu dipahami dalam konteks sejarahnya karena ia tidak dapat dipisahkan dari

⁶ Kajian ini menjawab fenomena Populisme Islam yang dirintis Felix Siauww melalui media sosial. Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi Felix Siauww sebagai potret populisme Islam di kalangan warganet. Pertama, populisme Islam tidak dapat dipisahkan dari antikeamanan. Kedua, populisme Islam tidak dapat dipisahkan dari sikap anti otoriter. Ketiga, populisme berisi purifikasi keagamaan. Muhammad, Nur Afni. "Populisme dan Dinamika Otoritas Keagamaan Dalam Islam Di Media Sosial." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (2021): 113-130.

⁷ Kajian ini membahas fenomena Aksi Bela Islam (ABI) 411 dan 212 tahun 2016 yang bertekad meminta keadilan atas sikap tidak hormat yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI Jakarta). Penggambaran setiap fenomena ditelaah melalui tiga aspek utama gerakan sosial yakni, struktur kesempatan politik, sumberdaya mobilisasi, dan pembingkaiannya serta populisme Islam. Agusta, Travellio Ryan. "Gerakan Politik Dan Populisme Islam (Studi Kasus Aksi Bela Islam 411 Dan 212 Tahun 2016)." Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta, 2020.

⁸ Tulisan ini mengajukan dalil bahwa GNPF-Ulama bukanlah satu-satunya kekuatan dalam menyikapi tujuan politik umat Islam di Indonesia saat ini, sebagai unit uji standar ketika berbicara tentang populisme Islam di Indonesia. Ada Nahdlatul Ulama (NU) yang berperan signifikan dalam upaya menantang dan mencoba memulihkan wacana populisme Islam dari GNPF-Ulama. Terlepas dari perbedaan ideologi keagamaan, perbincangan tentang populisme Islam di Indonesia tidak terlepas dari persoalan pertarungan wacana yang terjadi di dalam internal kekuatan kelompok Islam itu sendiri. Jayanto, Dian Dwi. "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU)." *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 1-25.

⁹ Margaret Canovan, *Populism* (New York: HBJ, 1981). Hlm. 7

latar belakang historisnya. Populisme umumnya dianggap sebagai dinamika alami dalam sistem demokrasi, sering kali muncul sebagai respons langsung dari masyarakat terhadap sistem demokrasi yang bermasalah.¹⁰ Pada awalnya, populisme mencerminkan resistensi terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga demokrasi, dan dapat diartikan dalam berbagai cara.

Perkembangan historis populisme selalu terkait erat dengan berbagai ideologi, tergantung pada negaranya, seperti liberalisme di sebagian besar negara Eropa, komunisme di Venezuela, nasionalisme di Amerika Utara, dan kelompok agama tertentu di Amerika Serikat dan Indonesia.¹¹ Gerakan populisme sering terkait dengan ideologi-ideologi lain untuk membangkitkan sentimen dan membentuk kekuatan politik.

Keuntungan populisme sebagai ideologi yang tipis (*thin-centered ideology*) adalah fleksibilitasnya dibandingkan dengan ideologi tebal (*thick-centered ideology*) seperti fasisme, liberalisme, dan sosialisme. Populisme sebagai ideologi tipis memiliki morfologi terbatas dan dapat menyatu dengan ideologi-ideologi lain, sehingga hampir selalu terkait dengan elemen-elemen ideologis lainnya.¹²

Terdapat empat gaya populisme. Pertama, autokrasi populis melibatkan tokoh-tokoh karismatik yang mendapatkan kekuasaan secara tidak konstitusional dengan memberikan "makanan dan hiburan" kepada massa. Contohnya adalah Juan Peron dan istrinya, Eva, yang membangun pengikut setia di Argentina pada tahun 1940-an melalui autokrasi populis.

Kedua, demokrasi populis menentang representasi dan berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan rakyat. Ini melibatkan referendum untuk legislasi yang diusulkan oleh badan perwakilan, inisiatif publik yang memungkinkan pemilih untuk mengajukan undang-undang melalui referendum, dan lembaga recall yang memungkinkan wakil rakyat yang tidak memuaskan dipanggil untuk pemilihan ekstra.

Ketiga, populisme reaksioner yang menggambarkan para politisi yang memainkan prasangka massa dalam negara-negara demokrasi untuk menentang pandangan yang

¹⁰ Bahtiar Budiman Nur, *Populisme Di Indonesia Sebagai Ancaman Polarisasi Masyarakat*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 01, No. 02, Oktober 202. hlm. 236

¹¹ Robertus Wijanarko, *Religious Populism and Public Sphere in Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 2021. Hlm. 3

¹² Cas Mudde and Cristobal Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, (United States of America: Oxford University Press, 2017), h. 6.

dianggap lebih cerdas dari elit politik. Para politisi yang mendapatkan popularitas dengan memanipulasi konflik etnis atau mempromosikan pandangan sayap kanan tentang ketertiban umum sering disebut sebagai populisme dalam arti ini.

Keempat, populisme para politisi yang menghindari komitmen ideologis, mengklaim berbicara atas nama seluruh rakyat daripada kelompok tertentu. Gaya partai mereka adalah "untuk semua orang," dengan prinsip yang minimal, kebijakan yang fleksibel, dan terbuka untuk semua pendatang.¹³

Situasi krisis yang dapat memfasilitasi populisme didefinisikan dalam tiga cara. Pertama, krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pertumbuhan, dampak globalisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain memberikan pijakan subur bagi klaim-klaim populisme. Kedua, populisme menjadi kritik tajam terhadap kegagalan demokrasi representatif. Ketiga, kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat dan janji-janji demokrasi yang tidak terpenuhi dimanfaatkan oleh pemimpin populis untuk retorika politik mereka.¹⁴

B. Populisme Islam

Term populisme Islam dipopulerkan oleh Vedi R Hadiz, sebagai salah satu jenis populisme dalam menganalisis fenomena di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Distingui antara populisme Islam dan populisme secara umum terletak pada konsep *the people* (rakyat). Dalam populisme umum, perbedaan dalam masyarakat dihomogenisasi menjadi "rakyat." Sebaliknya, homogenisasi populisme Islam melalui *the ummah* (ummat). Dalam pandangan populis Islam, setiap individu, terlepas dari karakteristik yang berbeda, dianggap sebagai bagian dari ummah, mewakili kelompok yang terpinggirkan oleh elit mayoritas. Istilah ummah penting untuk memobilisasi dukungan massa, mengingat kompleksitas keagamaan dalam masyarakat modern.¹⁵

Idea tentang komunitas Islam menyatukan, tetapi bersifat temporer dengan pertentangan internal berbagai kepentingan dalam masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Persatuan ini tidak bisa direduksi menjadi satu kelas. Meskipun tidak

¹³ Margaret Canovan, "Populisme." in *The Social Science Encyclopedia*, ed. Adam Kuper dan Jessica Kuper (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) Hlm. 807

¹⁴ Itok Kurniawan & Ardhani Putri, Hanuring, *Perkembangan Politik Populisme di Indonesia*, Jurnal Inovasi Penelitian, 2(4), 1065-1072, 2021. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.634>

¹⁵ Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*, (Jakarta: LP3S dan Universitas Indonesia, 2019), h. 20.

dapat direduksi menjadi kelas, ia mempengaruhi kelas-kelas dan juga dipengaruhi oleh kelas-kelas. Selain proxy ummah, populisme Islam juga ditandai dengan gerakan dan aliansi yang terbentuk dari koalisi multikelas (berbagai kelas yang beragam) dan didukung oleh kelas menengah dan kaum terdidik.¹⁶

Vedi Hadiz memberikan distingsi antara populisme Islam pada masa kolonial dan pasca-kolonial. Varian awal lebih defensif karena umat Islam saat itu berada di bawah tekanan dari pemerintah kolonial (Perancis, Inggris, Portugal, dan Belanda). Sebagian besar negara yang dijajah dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20 adalah negara-negara dengan pemerintahan Islam dan mayoritas penduduk Muslim. Karakter defensif dari populisme Islam jenis ini terletak pada tekadnya untuk mendirikan negara Islam dan mengusir para penjajah. Identitas Islam menjadi faktor pemisah antara orang-orang yang dijajah dan para penjajah. Term kafir disematkan kepada para penjajah dan pendukung mereka.¹⁷

Di sisi lain, varian kedua, menurut Vedi Hadiz, muncul setelah kemerdekaan dan disebut sebagai populisme Islam baru (*new islamic populism*). Pada masa ini, umat Islam tidak lagi berhadapan dengan non-muslim. Pemerintah di negara-negara Muslim juga merupakan penganut agama yang sama. Namun, mereka dianggap tidak memihak pada kepentingan umat Islam. Kebijakan politik, ekonomi, dan budaya yang dibuat oleh pemerintah dianggap merugikan umat Islam. Oleh karena itu, fokus populisme Islam kontemporer adalah meningkatkan peran politik, ekonomi, dan sosial umat Islam di negara masing-masing (Turki, Mesir, Indonesia, dll). Tidak seperti populisme Islam klasik pada masa kolonial, agenda populisme Islam kontemporer bukan tentang mendirikan negara Islam, tetapi tentang mengubah atau meningkatkan posisi sosial dan politik umat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Populisme Islam, dalam tilikan Wasisto, memiliki berbagai bentuk. Pertama, diskriminasi dan alienasi sebagai analisis klasik dalam membahas populisme Islam di kalangan kelas menengah Muslim, yang memicu mobilisasi massa. Kedua, ketidakpuasan terhadap praktik politik demokrasi yang tidak memihak pada umat Muslim, sementara

¹⁶ Hadiz, *Populisme Islam*, h. 22.

¹⁷ Hadiz, *Populisme Islam*, h. 44.

¹⁸ Hadiz, *Populisme Islam*, h.129

politik terbuka didominasi oleh elit baru. Implikasinya, hal tersebut mengarah pada sentimen politik dengan keinginan dan kepentingan yang tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan intoleransi terhadap elemen lain dalam masyarakat. Ketiga, melibatkan para pengikut individu atau kelompok yang bertindak sebagai patron mereka. Mobilisasi massa Islam terkait dengan logistik dan sumber daya yang signifikan, sehingga rentan dipengaruhi dan didominasi oleh kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan Islam.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, populisme agama, terutama di kalangan mayoritas masyarakat Muslim, sangat berpengaruh. Hal ini nampak jelas dalam aksi 212 (bela Islam) dengan Ahok sebagai terdakwa atas tuduhan penodaan agama. Aksi 212 menunjukkan munculnya gerakan sosial berbasis agama.²⁰ Gerakan dan aktor populis biasanya fokus pada isu-isu sentral dan sensitif, terutama yang berhubungan dengan agama.

Di Indonesia, populisme secara umum bermain dalam politik identitas (agama dan budaya) sebagai alat politik. Politik identitas memiliki pengaruh kuat dalam politik Indonesia, terutama yang berbasis pada keyakinan Islam. Vedi R. Hadiz dalam karyanya yang berjudul "Islamic Populism in Asia and the Middle East" (2016) melihat dan menghubungkan aksi 212 (bela Al-Qur'an) atau yang dikenal sebagai aksi 411 dan 212, dengan Ahok sebagai terdakwa atas tuduhan penodaan agama, dan bersamaan dengan pemilihan gubernur Jakarta, sebagai fenomena dan momentum kebangkitan populisme identitas berbasis agama "Islam".²¹ Populisme di Indonesia cenderung berbasis pada agama dan budaya.

Secara singkat, Populisme di Indonesia, digabungkan dengan politik dan agama, dapat memobilisasi dan memfasilitasi pembentukan sistem eksklusivisme dalam masyarakat, yang mengakibatkan perpecahan lebih lanjut. Agama dan budaya menyebarkan aturan dan ajaran eksklusif. Dalam konteks Indonesia, "populisme

¹⁹ Wasisto Raharjo Jati, *Trajektori Populisme Islam di Kalangan Kelas Menengah Muslim Indonesia*, Jurnal Prisma, Vol. 36, No. 3, 2017, h. 25.

²⁰ Ahmad Sholikin, *Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III*, Madani, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 10 No. 1 2018. Hlm. 14-16

²¹ Syamsul Arifin, *Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Maarif Vol.14, No. 1 - Juni 2019. Hlm. 17

agama sangat kuat dalam membangkitkan opini publik dan mengumpulkan massa untuk kepentingan atau manuver politik".²²

C. Melampaui Populisme Islam

Jika bagian sebelumnya memaparkan tentang populisme Islam, maka bagian ini akan menjelaskan tawaran populisme progresif Chantal Mouffe. Bagi Mouffe, demokrasi meniscayakan konflik dan kontestasi antar pelbagai golongan dan ideologi. Untuk menjaga agar konfrontasi dalam politik tetap hidup, demokrasi agonistik meniscayakan oposisi. Oposisi adalah lawan politik yang posisinya harus dilindungi. Pada titik ini, populisme Islam harus dilindungi sekaligus dilampaui dengan wacana progresif, yakni populisme yang menggemakan dan memajukan isu kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan lain sebagainya.

Untuk menjelaskan tawaran pemikiran Chantal Mouffe, subbab ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan menjelaskan distingsi antara politik dan yang politis. Sedangkan bagian kedua akan memaparkan tentang demokrasi agonistik. Terakhir, bagian ketiga adalah populisme progresif.

1. Yang Politis dari Politik

Dua istilah penting dalam teori demokrasi Chantal Mouffe adalah (1) politik dan (2) yang politis. Mouffe membuat perbedaan antara politik (*politics*) dan yang politis (*the political*). Dalam bahasa sehari-hari, orang jarang berbicara tentang yang politis. Selain itu, batas antara politik dan yang politis tampak kabur. Namun, bagi Mouffe, seperti yang dijelaskan dalam bukunya "On the Political," perbedaan teoretis dan konseptual antara politik dan yang politis penting sebagai permenungan yang lebih radikal tentang politik. Hal ini juga telah dibuat oleh pemikir politik lain, meskipun tidak ada kesepakatan di antara mereka tentang makna dan arti dari istilah-istilah ini.

Secara umum, ada dua pendekatan yang dapat memberikan arahan untuk penjelasan lebih lanjut tentang pemahaman antara politik dan yang politis. Pendekatan pertama adalah ilmu politik yang berhubungan dengan bidang empiris politik, dan pendekatan kedua adalah teori politik yang merupakan domain para filsuf yang mempertanyakan bukan fakta-fakta politik (*politics*), melainkan esensi dari yang politis

²² Robertus Wijanarko, *Religious Populism and Public Sphere in Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 2021. Hlm. 5

(*the political*). Secara filosofis, perbedaan ini digambarkan oleh Heidegger sebagai berikut: politik (*politics*) merujuk pada tingkat ontis, sementara yang politis (*the political*) merujuk pada tingkat ontologis. Yang ontis berhubungan dengan berbagai praktik politik konvensional, sedangkan yang ontologis berhubungan dengan cara masyarakat dilembagakan.²³

Meskipun Heidegger telah menunjukkan perbedaan semacam itu, kemungkinan konflik tentang apa yang membentuk yang politis (*the political*) tetap ada. Hannah Arendt, misalnya, melihat yang politis sebagai ruang kebebasan dan konsultasi publik. Bagi Arendt, yang politis baru terbentuk ketika manusia berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, bagi Arendt, subjek tunggal (manusia) tidak bersifat politis. Yang politis adalah subjek-subjek (manusia-manusia). Dengan kata lain, tidak ada manusia yang dari kodratnya bersifat politis sebagaimana dipahami oleh Aristoteles dengan istilah *zoon politicon*. Yang politis berada di antara manusia-manusia. Ia baru terbentuk ketika manusia berkomunikasi atau berdeliberasi. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menghilangkan komunikasi dan berdeliberasi di ruang publik dianggap sebagai tindakan antipolitik. Suasana antipolitik hanya terbentuk dalam kondisi penguasaan atau rezim otoriter. Oleh karena itu, rezim otoritarianisme Orde Baru dalam kerangka pemikiran Arendt dianggap sebagai rezim antipolitik atau rezim tanpa yang politis (*political*).

Berbeda dengan Arendt, pemikir lain seperti Schmitt melihat yang politis (*the political*) sebagai ruang kekuasaan, pertentangan, dan antagonisme.²⁴ Schmitt juga tampak dipengaruhi oleh Heidegger yang melihat pertentangan sebagai sesuatu yang abadi dalam yang politis (*the political*). Heidegger mengambil inspirasi dari fragmen 53 Heraklitos yang berbunyi: "Polemos (pertentangan) adalah ayah dari segala yang ada". Jadi, baik Schmitt maupun Heidegger melihat yang politis (*the political*) sebagai medan pertentangan dan bukan medan pencapaian konsensus. Secara implisit, bagi keduanya, setiap upaya untuk mencapai konsensus dalam ranah politik (*the political*) menghilangkan karakter yang politis itu sendiri. Pada titik ini, proyek-proyek Rawls dan

²³ Chantal Mouffe, *On the Political*, (New York: Roudledge, 2005), Hlm. 8

²⁴ Carl Schmitt, *The Concept of the Political*. Trans. George Schwab (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 2007) Hlm. 26-27

Habermas dan para pengikutnya dianggap menghancurkan atau menghilangkan yang politis (the political).²⁵

Bagaimana Mouffe menafsirkan yang politis mengikuti pandangan terakhir di atas. Selain itu, dia mengakui adanya distingsi antara aspek yang politis (the political) dan masalah politik (politics). Yang politis (the political), bagi Mouffe, adalah elemen antagonisme yang menjadi konstitusi dalam budaya manusia. Oleh karena itu, ancaman ini melekat dalam hubungan manusia. Oposisi bisa mengambil banyak bentuk dan muncul dalam berbagai jenis hubungan sosial. Di sisi lain, politik (politics) adalah kumpulan praktik, diskusi, dan institusi yang dapat menciptakan ketertiban dan mengorganisir kesepakatan di antara orang-orang dalam konteks konflik yang disediakan oleh yang politis.²⁶

Lebih lanjut, Mouffe menegaskan bahwa hanya ketika dimensi yang politis diakui dan politik dipahami sebagai upaya menjinakkan permusuhan dan meredakan potensi pertentangan yang ada dalam hubungan manusia, pertanyaan sentral untuk demokrasi dapat diajukan. Pertanyaannya tidak dirumuskan dalam formula kaum rasionalis, yakni bagaimana mencapai konsensus tanpa pengucilan (eksklusi). Pertanyaan semacam ini menyiratkan pemberantasan politik. Padahal, politik bertujuan menciptakan persatuan dalam konteks konflik dan keragaman. Hal itu mengandaikan penciptaan "kita" dengan determinasi "mereka".

Selain itu, Mouffe menekankan bahwa hanya ketika aspek yang politis diakui dan politik dipahami sebagai upaya untuk menaklukkan agresi dan meredakan bentrokan yang mungkin terjadi dalam hubungan antar manusia, pertanyaan pokok bagi demokrasi dapat diajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dirumuskan dalam formula realistik tentang bagaimana mencapai kesepakatan tanpa eksklusi.²⁷ Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengimplikasikan penghancuran politik. Namun, politik bertujuan menciptakan persatuan dalam konteks konflik dan keragaman. Hal itu mengandaikan penciptaan "kita" dengan determinasi "mereka".

²⁵ Adian, Donny Gahral, *Konstitusi dan Substansi Demokrasi* (Jakarta: Demos – Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2010), Hlm. 2

²⁶ Chantal Mouffe, *The Democratic Paradox* (London – New York: Verso, 2000) Hlm. 101

²⁷ Chantal Mouffe, *The Democratic*, Hlm. 101

Berdasarkan perbedaan di atas, demokrasi memerlukan konflik dan kontestasi antara berbagai kelompok dan ideologi. Tidak ada demokrasi tanpa konflik dan kontestasi. Demokrasi adalah ruang yang konflikual yang merupakan hasil dari aspek yang politis, yaitu ontologi politik. Singkatnya, aspek yang politis adalah dimensi yang konflikual yang menjadi konstitutif dari persetujuan manusia dan hubungan sosial, yang kemudian dibedakan dari politik. Bagi Mouffe, politik mengacu pada serangkaian praktik, diskusi, dan institusi yang menghasilkan kebijakan dan mengorganisir masyarakat, selalu ada dalam konteks aspek konflikual sebagai konsekuensi logis dari aspek ontologisnya, yaitu yang politis.²⁸

Dalam aspek yang politis ini, demokrasi berfungsi sebagai tempat di mana berbagai aktor politik bersaing, termasuk persaingan antara kelompok rasional dan emosional. Pertanyaannya, mungkinkah ada politik tanpa emosi? Mouffe mengatakan tidak. Politik dalam demokrasi selalu terkait dengan emosi; partai-partai sayap kiri dengan politik harapan dan partai-partai sayap kanan menggunakan politik ketakutan. Emosi adalah bagian yang tak terhindarkan dari politik dalam demokrasi, begitu pula dengan politik identitas yang cenderung lebih emosional daripada rasional. Dalam konteks ini, populisme, yang selalu dikaitkan dengan politik emosi dan politik identitas oleh pendukung demokrasi liberal, adalah elemen yang sah dalam demokrasi.

2. Demokrasi Agonistik

Asas pluralisme agonistik atau demokrasi agonistik Chantal Mouffe dimaksudkan sebagai tawaran alternatif yang mempertahankan perbedaan karakter dan identitas yang tidak menyebabkan agresi terbuka. Tujuannya adalah menekan antagonisme. Istilah "agon" dalam bahasa Yunani digunakan untuk menggambarkan pembatasan ini, di mana kontestasi nyata antara anggota afiliasi politik dapat tercapai. Istilah yang tepat untuk menggambarkan pembatasan antagonisme ini dalam konteks ini adalah "agonisme".²⁹

²⁸ Chantal Mouffe, *On the Political*, (New York: Routledge, 2005), hal. 8-9.

²⁹ Term agonisme muncul dua kali dalam Michel Foucault, tetapi dalam cara yang berbeda. Kita juga menemukan term "agon" (kontes tanpa permusuhan) di dalam Friedrich Nietzsche, dan juga "agon" dalam bahasa Yunani. Selain itu, banyak juga orang lain yang menggunakan konsep agonisme, seperti Bill Connolly, Bonnie Honig, James Tully, dan Hannah Arendt. Pada umumnya mereka yang mengembangkan konsep agonisme itu dipengaruhi oleh Arendt dan Nietzsche. Honig dipengaruhi oleh Arendt; Connolly dipengaruhi oleh Nietzsche. Namun, Mouffe dipengaruhi oleh Carl Schmitt. Dalam pandangan Mouffe, Honig dan Connolly memahami agonisme sebagai "agonisme tanpa antagonisme". Sedangkan Mouffe memahami agonisme selalu dalam arti "agonisme dengan antagonisme". Dalam konteks ini, relasi

Mengubah ancaman menjadi agonisme memiliki konsekuensi penting dalam mengakui perbedaan dan melegitimasi kontestasi tanpa kekerasan. Pengakuan ini mengharuskan pengarahannya "hasrat kolektif" menuju desain demokratis. Sebagai kekuatan utama dalam politik, "hasrat kolektif" tidak ditindas dalam arena publik untuk mencapai kesepakatan, tetapi dipersiapkan untuk mendukung dan sesuai dengan desain demokratis. Agar selaras dengan desain demokratis, pengungkapan "hasrat kolektif" dalam arena publik tidak boleh menghancurkan musuh (*enemy*), melainkan memandang mereka sebagai lawan (*adversary*). Dalam hal ini, Mouffe menulis:

Antagonism is struggle between enemies. while agonism is struggle between adversaries. We can therefore reformulate our problem by saying that envisaged from the perspective of 'agonistic pluralism' the aim of democratic politics is to transform antagonism into agonism. This requires providing channels through which collective passions will be given ways to express themselves over issues which, while allowing enough possibility for identification, will not construct the opponent as an enemy but as an adversary. An important difference with the model of 'deliberative democracy' is that for 'agonistic pluralism', the prime task of democratic politics is not to eliminate passions from the sphere of the public, in order to render a rational consensus possible, but to mobilize those passions towards democratic designs.³⁰

Salah satu teori inti dari keberagaman agonistik adalah bahwa diskursus agonistik merupakan kondisi niscaya yang menjamin keberadaan demokrasi. Keunikan demokrasi modern terletak pada pengakuan dan pembenaran konflik serta penolakan terhadap penindasannya melalui sistem otoriter.³¹ Yang ditekankan di sini adalah bahwa konflik dan perlawanan adalah hal-hal yang mendasari politik. Tanpa konflik, ancaman, dan ketegangan sosial, tidak ada politik. Model demokrasi agonistik bertujuan untuk meradikalkan konflik, permusuhan, dan ketegangan sosial ini sambil mengubahnya menjadi bentuk yang tidak merusak. Hal ini dilakukan dengan mengubah permusuhan

agonistik dalam pandangan Mouffe berarti relasi antagonisme yang tersublimasi. Ia juga berbicara mengenai "relasi yang dijinakan", untuk menunjukkan antagonisme yang tidak tampak.) Allan Dreyer Hansen & André Sonnichsen, "Radical Democracy, Agonism and the Limits of Pluralism: an Interview with Chantal Mouffe". *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*, Vol. 15, No. 3, Agustus, 2014, Hlm 268

³⁰ Chantal Mouffe, *The Democratic Paradox* (London – New York: Verso, 2000) Hlm. 102

³¹ Chantal Mouffe, *The Democratic*, Hlm. 103

sosial menjadi agonisme. Jika ancaman mengacu pada kontestasi antara dua kelompok yang saling bermusuhan (kawan/musuh) yang berusaha saling menghancurkan, maka konsep agonisme mengacu pada kontestasi antara dua kelompok yang berlawanan (kawan/lawan) yang tidak saling menghancurkan, tetapi saling mengakui validitas setiap posisi.³²

Seperti yang disebutkan di awal tulisan ini, demokrasi memerlukan konflik. Idealisasi mencapai keuntungan untuk semua orang tidak hanya bergantung pada partisipasi, tetapi juga pada konflik. Konflik tampak dalam pertentangan pendapat antara penguasa dan oposisi. Untuk menjaga pertarungan politik tetap hidup, demokrasi membutuhkan populisme sebagai oposisi. Populisme adalah pesaing politik yang posisinya harus dipertahankan. Keberadaan populisme sebagai oposisi sangat penting untuk memastikan potensi pengawasan terus berlanjut. Dalam konteks ini, populisme Islam diharapkan untuk tetap menjaga komitmen mereka sebagai oposisi terhadap pemerintah dalam bentuk yang tidak destruktif.

3. Populisme Islam Progresif

Untuk melampaui populisme Islam, Chantal Mouffe menawarkan sebuah konsep yang disebut populisme progresif yang berbasis klaim kedaulatan rakyat. Perbedaannya terletak pada pemikiran, suara, dan isu yang diangkat. Populisme progresif - sebagaimana namanya - erat kaitannya dengan pemikiran sosial progresif daripada isu-isu nasionalis.³³

Dalam konsep Chantal Mouffe, populisme progresif digunakan untuk melampaui populisme sayap kanan, termasuk populisme Islam, agar mendapatkan percakapan dan otoritas dalam ruang publik. Isu kritik-kapitalisme dan kritik-neoliberalisme menjadi dasar pemikiran dan gerakan populisme progresif. Baik kapitalisme sebagai sistem ekonomi maupun neoliberalisme, yang dianggap telah menciptakan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, menjadi tantangan. Isu-isu tersebut, seperti kesejahteraan ekonomi masyarakat yang melemah, ketimpangan sosial, harga pasar yang melonjak, kekayaan yang dinikmati oleh kalangan atas, dan kesalahan manajemen ekonomi, mendorong munculnya populisme progresif sebagai pelampauan atas populisme Islam.

³² Hanif, Hasruf, "Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, Juli. 2007, Hlm. 133

³³ Cas Mudde, and Cristóbal Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, (Oxford University Press, 2017). Hlm. 21

Rakyat dan elit adalah sebuah penanda kosong (*the empty signifier*) yang terhindar dari keutuhan (totalitas) arti dan makna karena proses konstruksi terus menerus. Pada titik ini, populisme tergantung pada ideologi utama di mana populisme menempel. Ideologi utama merujuk pada ideologi pada umumnya.³⁴ Untuk itu, cara yang tepat bagi populisme progresif adalah membangun kehendak kolektif dari pelbagai gerakan perjuangan demokratik dengan menjadikan demokrasi beserta nilai-nilainya sebagai penanda simbolik. Apabila populisme kanan membangun kehendak kolektif dengan cara yang xenofobik, rasialis, dan terkotak-kotakan berdasarkan suku dan agama, pribumi dan non-pribumi, maka populisme Islam progresif harus mengonstruksi kehendak kolektif sebagai aliansi rakyat yang termarginalkan secara struktur ekonomi-politik, seperti komunitas kaum buruh, gerakan perempuan, ekologis, kaum miskin, dan lain sebagainya, melawan segelintir orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Pada titik ini, populisme progresif menggemakan dan memajukan isu kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, anti-kapitalisme dan anti-neoliberalisme serta lain sebagainya.

KESIMPULAN

Menguraikan paradoks populisme Islam yang memiliki efek demokrasi yang kontraproduktif, artikel ini menyajikan konsep populisme Islam progresif sebagai alternatif untuk bergerak melampaui paradoks ini. Artinya, alih-alih normalisasi ide-ide sayap kanan, atau untuk mendorong ide-ide ini dengan menghilangkannya, sebuah ruang dibayangkan di mana sentimen populis Islam didengarkan, namun secara bersamaan diunggah ke dalamnya nilai-nilai progresif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menawarkan pemikiran populisme Chantal Mouffe. Pertama, pada tataran teoritis, demokrasi meniscayakan konflik dan kontestasi antar pelbagai golongan dan ideologi. Demokrasi merupakan ruang konflikual yang merupakan konsekuensi dari *on the political*, 'yang-politis', sebagai ontologi politik. Oleh karenanya populisme merupakan watak khas dari demokrasi. Kedua, Untuk menjaga agar konfrontasi dalam politik tetap hidup, demokrasi agonistik meniscayakan oposisi. Oposisi adalah lawan politik yang posisinya harus dilindungi. Ketiga, terakhir,

³⁴ Cas Mudde, and Cristóbal Rovira Kaltwasser, *Populism*. Hlm. 6

populisme Islam harus dilampaui dengan wacana progresif yakni populisme yang menggemakan dan memajukan isu kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. *Konstitusi dan Substansi Demokrasi*. Jakarta: Demos – Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2010.
- Agusta, Travellio Ryan. "Gerakan Politik Dan Populisme Islam (Studi Kasus Aksi Bela Islam 411 Dan 212 Tahun 2016)." Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta, 2020.
- Arifin, Syamsul. "Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Maarif* Vol.14, No. 1 - Juni 2019.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Budiman Nur, Bahtiar. "Populisme Di Indonesia Sebagai Ancaman Polarisasi Masyarakat." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* Vol. 01, No. 02, Oktober 202.
- Canovan, Margaret. "Populisme." In *The Social Science Encyclopedia*, edited by Adam Kuper and Jessica Kuper. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hadiz, Vedi R. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Jakarta: LP3S dan Universitas Indonesia, 2019.

- Hanif, Hasruf. "Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, Juli 2007.
- Hansen, Allan Dreyer & André Sonnichsen. "Radical Democracy, Agonism and the Limits of Pluralism: an Interview with Chantal Mouffe." *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*, Vol. 15, No. 3, Agustus 2014.
- Jayanto, Dian Dwi. "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU)." *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 1-25.
- Kurniawan, Itok, & Ardhani Putri Hanuring. "Perkembangan Politik Populisme di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 4 (2021): 1065-1072.
- Mouffe, Chantal. "The 'end of politics' and the challenge of right-wing populism." In *Populism and the Mirror of Democracy*, edited by F. Panizza, 50-71. London, England: Verso, 2005.
- Mouffe, Chantal. *The Democratic Paradox*. London – New York: Verso, 2000.
- Mouffe, Chantal. *On the Political*. New York: Routledge, 2005.
- Mudde, Cas, and Cristóbal Rovira Kaltwasser. *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2017.
- Nur Afni, Muhammad. "Populisme dan Dinamika Otoritas Keagamaan Dalam Islam Di Media Sosial." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (2021): 113-130.
- Putra, Andi Eka. "Populisme islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15, no. 02 (2019): 218-227.
- Raharjo Jati, Wasisto. "Trajektori Populisme Islam di Kalangan Kelas Menengah Muslim Indonesia." *Jurnal Prisma*, Vol. 36, No. 3, 2017.
- Schmitt, Carl. *The Concept of the Political*. Translated by George Schwab. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007.
- Sholikin, Ahmad. "Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III." *Madani, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 10 No. 1, 2018.

Wijanarko, Robertus. "Religious Populism and Public Sphere in Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 2021.